

PENGARUH TATA KELOLA (*CORPORATE GOVERNANCE*) PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL CAPITAL*)

Rio Ariesta Heditya, Dul Muid¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of corporate governance on the disclosure of intellectual capital in companies. The sample used consists of some manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2020.

This study uses multiple regression analysis by conducting analysis on manufacturing companies using purposive sampling method. The number of samples in the study used was 150 companies.

The results show that the size of the board of commissioners, the independence of the board of commissioners has a positive and significant effect on the company's intellectual capital research. Furthermore, for blockholder ownership, government ownership and board tenure have a negative and significant effect on intellectual capital.

Keywords: Corporate Governance, Disclosure of the Company's intellectual capital, Characteristics of the Board of Commissioners, Ownership Structure.

PENDAHULUAN

. Laporan keuangan konvensional perusahaan adalah dasar untuk mengekspresikan bagaimana pengambilan keputusan investasi itu diambil. Kesejahteraan pasar, serta investor bergantung pada data yang diberikan dalam suatu laporan keuangan (CFA, 2007). Meskipun penting, pernyataan ini memiliki kekurangan dari perspektif pasar modal (Schuster & O'Connell, 2006). Sebagai contoh, banyak perusahaan yang terdaftar didorong oleh penciptaan dan penggunaan aset tidak berwujud, seperti modal intelektual/*intellectual capital* (IC). Aset yang penting ini berkontribusi secara signifikan terhadap daya saing perusahaan (OECD, 2012).

Guthrie dan Petty (2000) beranggapan bahwa aset tidak berwujud, termasuk IC memiliki potensi untuk meningkatkan pasar modal secara efisien. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan IC, pelaporan keuangan tradisional tidak menyajikan kerangka kerja untuk pengungkapan tersebut (CFA, 2007). Untuk menghadapi keterbatasan ini, Petty & Cuganesan (2005) menyatakan bahwa informasi ini dilaporkan sukarela (*voluntary*) oleh perusahaan, untuk mewujudkan kebutuhan informasi pemangku kepentingan yang lebih layak. Dampaknya, banyak perusahaan dalam upaya mewujudkan permintaan pasar untuk informasi yang lebih andal, telah mulai secara sukarela menyempurnakan pelaporan keuangan tradisional mereka dalam wujud narasi, nonkeuangan (Abeysekera & Guthrie, 2005; Haji & Ghazali, 2013).

Keenan & Aggestam (2001) juga menemukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki dampak positif pada pengembangan serta pengelolaan IC perusahaan, yang dianggap sebagai suatu sistem bisnis, serta dapat memastikan para investor memperoleh informasi tentang penjualan dan kinerja keuangan perusahaan yang mampu melakukannya.

¹ *Corresponding author*

Puspitasari (2011), modal intelektual adalah suatu pengetahuan atau daya pikir dari sebuah perusahaan, dimana tidak ada bentuk fisiknya (*intangible*), dan suatu modal intelektual memungkinkan perusahaan untuk mencapai keuntungan tambahan atau pembentukan proses bisnis perusahaan dimana nilai yang didapat lebih tinggi dari para pesaingnya. Pengungkapan modal intelektual sendiri adalah salah satu pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar laporan keuangan mereka untuk meningkatkan informasi yang akan disampaikan pada para investor, pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para investor terhadap suatu perusahaan ketika memiliki informasi tentang aset tidak berwujud yang dapat menjadi nilai tambah dari perusahaan dibandingkan perusahaan lain.

Guthrie & Petty (2000), menyimpulkan bahwa modal intelektual adalah salah satu komponen penting dalam memastikan kekuatan nilai suatu perusahaan dan kinerja ekonomi. Contoh dari komponen suatu modal intelektual adalah: (1) Modal manusia adalah kemampuan serta karakteristik dari karyawan perusahaan itu sendiri, termasuk pengetahuan dan keterampilannya, seperti antusiasme, tingkat kecerdasan, sikap, memiliki komitmen, kreativitas, dan kemampuan ingin belajar lebih. Dari beberapa hal tersebut maka akan muncul nilai tambah untuk perusahaan. (2) Modal internal adalah pengetahuan perusahaan yang bertujuan untuk mengubahnya menjadi modal manusia untuk menciptakan nilai tambah pada perusahaan. Komponen ini meliputi berbagai sistem yaitu informasi, teknologi, distribusi, produksi, dan lainnya. (3) Modal eksternal adalah suatu kemampuan dari perusahaan untuk menambah nilai perusahaan dengan cara berinteraksi dengan beberapa pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya

Dewan komisaris Perusahaan adalah merupakan komponen dari perusahaan saham gabungan yang bertanggung jawab untuk pengawasan umum atau teknis dan nasihat kepada direksi berdasarkan anggaran dasar. Ukuran dewan komisaris adalah mengukur berapa jumlah dari dewan komisaris keseluruhan. Di Indonesia, aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 menyebutkan dewan komisaris paling sedikit terdiri dari dua orang anggota, dan salah satu anggotanya yaitu komisaris independen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 28, dewan komisaris bertanggung jawab atas kebijakan manajemen pengawasan manajemen umum, dan pengawasan terkait emiten dan perusahaan publik. Tidak hanya untuk menasihati dewan. Fama & Jensen (1983) mengemukakan bahwa kinerja dan tugas direksi dipengaruhi oleh jumlah dewan komisaris.

Komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komite lainnya. Di Indonesia, tugas dan tanggung jawab pejabat independen dirancang untuk menjalankan fungsi audit dengan melakukan review informasi keuangan, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan audit internal, Peraturan Organisasi Jasa Keuangan Tahun 2017 No. 57. Termasuk dalam isu tersebut. Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa komposisi dewan merupakan mekanisme penting untuk mengurangi konflik pengambilan keputusan internal yang menyebar. Komposisi dewan direksi mengacu pada campuran direktur internal (paruh waktu) dan direktur eksternal (paruh waktu). Di Indonesia, direktur internal disebut dewan dan direktur eksternal disebut komite.

Laporan keuangan telah lama memainkan peran penting dalam pemegang saham dalam tata kelola perusahaan (Dhillon & Rossetto, 2009). Edmans (2014) berpendapat pemegang saham utama, yang disebut *blockholders*, memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan. Dimana ukuran saham yang terdapat pada perusahaan dapat menanggung biaya untuk pengawasan manajer. Dou et al. (2016) mengemukakan akan tidak ekonomis untuk pemegang saham individu dalam menanggung biaya pemantauan yang signifikan karena mereka hanya menerima sebagian kecil dari keuntungan mereka. Hal ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendali (*wide ownership*). Oleh karena itu, *blockholder* membantu meningkatkan kualitas dan transparansi laporan.

Kepemilikan pemerintah adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan instansi pemerintah memiliki saham dalam perusahaan (Eng dan Mak, 2003). Kepemilikan pemerintah membantu menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Hal ini karena pemerintah telah memiliki mekanisme dan aturan yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga menjadi fasilitator yang efektif dan efisien sebagai pemantau kinerja bisnis. Firer dan Williams (2005) berpendapat bahwa direksi akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan IC yang melayani kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Masa jabatan dapat didefinisikan sebagai lamanya seseorang harus menjabat. Byrd et al. (2010) berpendapat bahwa hubungan antara komisaris dan direksi yang bersifat jangka panjang akan menimbulkan masalah institusi serta dapat mengurangi efektivitas dalam hal pengawasan manajemen. Vafeas (2003) menyatakan bahwa masa jangka panjang yang dimiliki dewan dapat berpengaruh positif dengan memberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang perusahaan serta lingkungan bisnisnya yang berubah. Dibandingkan dengan hubungan erat dengan manajemen tidak terlalu efektif bagi dewan untuk mengawasi perilaku manajemen.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976), adalah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang dimana melibatkan orang lain (*agent*) dimana membuat suatu keputusan yang tepat berdasarkan konflik kepentingan yang ada. Menurut teori keagenan, hubungan prinsipal-agen perlu menggunakan informasi secara efisien dalam suatu organisasi untuk meminimalkan asimetri informasi dan biaya berbasis risiko (Eisenhardt, 1989).

Asumsi dari teori agensi sendiri mengandaikan bahwa baik prinsipal maupun agen saling bekerjasama untuk memaksimalkan segala kepentingan individu. Namun jika tujuan dari keduanya berbeda akan memunculkan konflik kepentingan yang baru. Dengan demikian maka manajer cenderung akan lebih fokus pada proyek dan investasi yang menghasilkan laba yang besar dengan jangka waktu yang singkat daripada berfokus untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui proyek yang menguntungkan namun memerlukan jangka panjang.

Meningkatkan pengungkapan IC perusahaan adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan. Manajemen didorong untuk melakukan pengungkapan IC berdasarkan teori keagenan yang akan berdampak untuk mengurangi asimetri informasi. Dengan begitu agen sangat diharapkan untuk dapat mengungkapkan informasi sepenuhnya dalam mengurangi konflik.

Ukuran Dewan

Ukuran dewan bertujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan. Fama & Jensen (1983) menunjukkan bahwa angka ini yang akan mempengaruhi persepsi tanggung jawab direksi. Dalam teori agensi sendiri, tingkatan dewan yang lebih besar dapat mengungkapkan masalah agensi hanya karena dewan tersebut menyediakan lebih banyak keahlian, pengawasan administratif, serta akses ke berbagai sumber daya yang luas.

Selain itu, karena banyak direksi bekerja, ketidakpastian dalam asimetri informasi dapat dikurangi (Fauzi & Locke, 2012). Mahoney & Wang (2009) bahwa menambahkan anggota dewan dapat memberikan informasi lebih serta memberikan sumber daya yang berguna dan berpotensi baik. Oleh karena itu, semakin besar dewan, semakin kompetitif perusahaan secara langsung dan semakin baik pada lingkungan bisnis.

Di sisi lain, beberapa penelitian mendukung dewan yang lebih kecil. Contohnya adalah Jensen (1993). Dia berpendapat bahwa untuk penyesuaian yang lebih kompleks, semakin besar dewan, semakin kurang efektif untuk mengelola laba, jika lebih banyak direktur menggunakannya. Selain itu, memiliki lebih dari tujuh atau delapan anggota cenderung membuat koordinasi dan komunikasi menjadi kurang efisien dan lebih sulit untuk dikelola, sehingga dewan yang lebih kecil dapat meningkatkan kinerja.

Di Indonesia, menganut peraturan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 33 Tahun 2014 mengatur bahwa direksi (dewan komisaris) paling sedikit memiliki dua orang direktur, salah satunya harus merupakan pejabat independen. Berdasarkan teori keagenan diharapkan semakin banyak komisaris memiliki hubungan yang lebih penting dengan pengungkapan IC, mengingat semakin banyak komisaris dapat meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran Dewan memiliki dampak positif pada tingkat pengungkapan IC

Komisaris Independen

Komisaris independen yang bereputasi baik dapat melakukan motivasi serta dapat meningkatkan perusahaan dalam segi kuantitas dan kualitas pengungkapan (Huafang & Jianguo, 2007). Cerbioni & Parbonetti (2007) menyatakan bahwa dalam menjalankan model tata kelola pada perusahaan yang benar adalah ditunjukkan antara lain oleh dewan direksi yang terdiri dari direksi luar yang berperan aktif dalam pengawasan kegiatan ini penting dalam meningkatkan kualitas pengungkapan IC perusahaan secara keseluruhan. Akhirnya, Li et al. (2008) Dengan keahlian serta pengalaman yang luas dari direktur non-eksekutif, manajemen mengakui hubungan antara posisi pengungkapan dan nilai keuntungan di luar kepatuhan ritualistik dan non-kritis terhadap norma-norma yang ditetapkan. Dalam mengambil posisi lebih agresif, cerdas mencerminkan nilai modal intelektual.

Yang terjadi di Indonesia, direktur eksternal diwakili oleh komisaris independen. Sesuai dengan Pasal 33 dan 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dimana berasal dari pihak luar emiten atau dari perusahaan publik dan telah memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Jika pengurus terdiri dari dua orang atau lebih, maka jumlah anggota independen dalam komposisi itu paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota pengurus. Semakin tinggi persentase pejabat independen, semakin tinggi pengungkapan IC, mengingat pejabat independen mendapat manfaat dari motivasi reputasi untuk mengelola manajer dengan lebih baik dengan banyak anggota dewan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan perusahaan. Dari hasil ini, hipotesis penelitian bahwa:

H₂: Independensi Dewan Komisaris memiliki dampak positif terhadap tingkat pengungkapan IC

Kepemilikan Blockholder

Pemilik *blockholder* memiliki peran yang lebih besar untuk memantau serta mendisiplinkan manajer dalam mengatasi masalah keleluasaan yang timbul dari kepemilikan yang terdesentralisasi (Shleifer & Vishny, 1986). Edmans (2014) berpendapat bahwa pemegang saham utama mempunyai peran penting dalam tata kelola perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kepemilikan *blockholder* memberikan dorongan untuk menanggung biaya pengawasan manajemen. Sementara, Dou et al. (2016) berpendapat bahwa pemegang saham tidak memiliki kepemilikan mayoritas (yaitu kepemilikan luas), ternyata kurang berpengaruh dalam menanggung biaya pemantauan yang signifikan karena pemegang saham individu menerima sedikit manfaat. Oleh karena itu, pemegang *blockholder* membantu meningkatkan kualitas dan transparansi laporan. White et al. (2007) menyatakan bahwa suatu konsentrasi kepemilikan yang rendah setara dengan pengendalian manajemen, dan sebaliknya sama dengan pemilik manajemen. Sedangkan Li et al. (2008) menyatakan *blockholder* memiliki akses ke informasi bisnis yang mereka butuhkan, memberikan pemantauan yang efektif dan mengurangi misinformasi.

Berdasarkan efektivitas pemegang *blockholder* yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan serta memiliki kemampuan dalam menekan manajer dalam meningkatkan praktik akuntabilitas, transparansi, dan pengungkapan, semakin tinggi persentase pemilik pemegang blok, semakin besar pengungkapan IC. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan Blockholder memiliki dampak positif terhadap tingkat pengungkapan IC

Kepemilikan Pemerintah

Eng dan Mak (2003) mendefinisikan bahwa kepemilikan pemerintah adalah bagian saham yang dimiliki oleh pemerintah serta lembaga terkait. Firer dan Williams (2005) menyimpulkan kepemilikan dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan dan berpengaruh pada praktik pengungkapan, termasuk masalah tentang IC. Mereka menunjukkan bahwa direksi perusahaan lebih berfokus pada langkah-langkah seperti pengembangan sumber daya manusia serta IC yang memiliki manfaat bagi pemerintah. Direktur memakai pengungkapan IC dalam memberikan indikasi kepada lembaga serta publik bahwa telah menerapkan kebijakan pemerintah pada bidangnya masing-masing

Secara empiris, hubungan yang terjadi antara kepemilikan pemerintah serta pengungkapan IC belum dipelajari lebih rinci. Pada umumnya, yang terjadi antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC adalah hubungan yang menunjukkan pengaruh positif. Firer dan Williams (2005)

di Singapura, Gan et al. (2013) dan Haji dan Ghazali (2013) di Malaysia menemukan hubungan positif serta sangat signifikan yang terjadi antara proporsi kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC. Dengan banyaknya tekanan yang luar biasa dari pemerintah serta masyarakat agar perusahaan lebih transparan dalam pengelolaannya, maka perlu adanya pengungkapan informasi yang lebih komprehensif mengenai aset perusahaan, termasuk IC, yang erat kaitannya dengan penciptaan nilai perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

H₄: Kepemilikan Pemerintah memiliki dampak positif terhadap tingkat pengungkapan IC

Masa Jabatan Dewan

Studi tentang masa jabatan yang dimiliki dewan masih sangatlah terbatas serta memberikan bukti yang bertentangan tentang bagaimana dampak dari masa jabatan pada dewan direksi perusahaan. Vafeas (2003) menyatakan bahwa sebagai dewan direksi meningkat dalam masa jabatan, mereka menjadi lebih berpengetahuan tentang perusahaan serta dalam perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, dengan hubungan yang baik antara manajemen dapat mengakibatkan terjadinya kinerja dewan yang kurang efektif dalam tugasnya memantau tentang perilaku manajemen. Byrd et al. (2010) menemukan mengenai hubungan jangka panjang yang terjalin antara dewan komisaris dengan dewan direksi dapat meningkatkan masalah keagenan serta dapat mengurangi tingkat efektivitas dari fungsi pengawasan pada manajemen.

Beberapa penelitian mengenai dampak masa jabatan anggota dewan pada pengungkapan sosial perusahaan menunjukkan dampak yang sama pada pengungkapan IC dan menunjukkan masa kerja anggota dewan memiliki pengaruh negatif dalam pengungkapan CSR (Handajani et al., 2014). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian Vafeas (2003) dan Byrd et al., (2010). Oleh sebab itu, penelitian ini didasarkan pada hipotesis berikut:

H₅: Masa Jabatan Dewan memiliki dampak negative terhadap tingkat pengungkapan IC

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan IC. Pada pengungkapan pendorongnya dan melaporkan bahwa isi dalam laporan paling sering digunakan dalam aktivitas pengukuran tingkat pengungkapan IC. Dalam pendekatan ini, informasi kualitatif serta kuantitatif dibagi dalam beberapa kategori tertentu untuk memperoleh pola penyajian dan pelaporan informasi (Guthrie et al., 2004). Studi empiris sebelumnya (Guthrie & Petty, 2000; Li et al., 2008; Abeysekera, 2010; Haji & Ghazali, 2013) menggunakan pendekatan dikotomi (tanpa bobot) untuk mengukur tingkat pengungkapan IC. Pada pendekatan ini, nilai "0" digunakan untuk tidak adanya item yang muncul serta nilai "1" diberikan saat item muncul. Untuk setiap perusahaan, peneliti meninjau laporan tahunan perusahaan untuk mengidentifikasi kemunculan 24 kata kunci dan mencatat skor dalam lembar kode. Skor pengungkapan keseluruhan dihitung untuk setiap perusahaan dan diindeks untuk mengukur tingkat pengungkapan relatifnya. Indeks adalah rasio skor pengungkapan aktual perusahaan dengan jumlah maksimum yang mungkin (yaitu, 24).

Variabel independen penelitian ini adalah ukuran dewan (BSIZE), dewan komisaris independen (OUT), kepemilikan *blockholders* (BLOK), kepemilikan pemerintah (GOV), dan masa jabatan dewan komisaris (BTENURE). Ukuran dewan adalah metode yang digunakan untuk mengukur berapa total anggota dewan komisaris. Dalam pengukurannya variabel ini memakai pengukuran secara umum dalam pengukuran dewan direksi. Dengan menggunakan jumlah anggota direksi digunakan pada pengukuran dewan komisaris.

Dewan komisaris independen merupakan campuran yang terdiri antara dewan direksi internal (eksekutif) serta eksternal (non-eksekutif). Dalam pengukurannya variabel ini menggunakan persentase komisaris independen dibandingkan menggunakan jumlah dewan komisaris.

Kepemilikan *blockholder* adalah a) Kepemilikan saham yang jumlahnya lebih dari 5%; b) Saham dimiliki oleh karyawan, direktur, atau anggota keluarganya; c) Saham dimiliki oleh bank; d) Saham dimiliki oleh perusahaan lain (kecuali perusahaan dalam status digadaikan); e) Saham dimiliki oleh seseorang karena adanya tunjangan pension. Untuk mengukur variabel dengan

menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki adalah minimal 5% (persen) dari jumlah saham beredar yang digunakan dalam perhitungan persentase kepemilikan *blockholder*.

Kepemilikan pemerintah adalah persentase saham yang dimiliki pemerintah serta instansi terkait pemerintah dalam suatu perusahaan. Kepemilikan pemerintah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan jumlah yang beredar. Persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah minimal 5% (persen) dari keseluruhan saham yang dikeluarkan.

Masa jabatan yang dimiliki dewan komisaris adalah rata-rata masa jabatan dewan komisaris dalam suatu korporasi. Untuk mengukur variabel tersebut dengan ukuran umum, dalam penelitian ini menggunakan rata-rata masa kerja dewan komisaris dalam perusahaan.

Populasi & Sampel

Populasi berdasarkan kumpulan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi terhitung sebanyak 50 perusahaan. Periode waktu selama tiga tahun (2018-2020) digunakan untuk penelitian ini.

Metode *purposive sampling* digunakan oleh peneliti karena peneliti membutuhkan perusahaan yang menyediakan informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang dipakai secara lengkap. *Purposive sampling* dilakukan agar sampel mampu mewakili populasi yang dipilih atau bersifat representatif. Pertimbangan yang diperlukan peneliti untuk mengambil sampel yang digunakan yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit pada Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2018-2020
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan
4. Memberikan data yang peneliti butuhkan untuk mengukur variabel dependen, variabel independen yang ditetapkan pada penelitian ini.

Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui laporan tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasi pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi dari perusahaan terkait. Data yang digunakan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dengan rentang waktu 2018-2020.

Metode Analisis

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menguji hipotesis antara lain: uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji korelasi dan uji hipotesis. Dengan menggunakan metode analisis, peneliti dapat menemukan arah dan mengukur besarnya efek dari variabel independen terhadap variabel dependen. Maka peneliti akan mengetahui arah dan efek dari ukuran dewan (BSIZE), dewan komisaris independen (OUT), kepemilikan *blockholders* (BLOK), kepemilikan pemerintah (GOV), dan masa jabatan dewan komisaris (BTENURE). Persamaan regresi akan dilakukan untuk menguji sejumlah hipotesis yang disediakan, dengan cara sebagai berikut:

$$IC = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 OUT + \beta_3 BLOCK + \beta_4 GOV + \beta_5 BTENURE + \epsilon_i$$

Keterangan :

BSIZE = Ukuran Dewan

GOV = Kepemilikan Pemerintah

OUT = Komisaris Independen

BTENURE = Masa Jabatan Dewan

BLOCK = Kepemilikan Blockholder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari populasi dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan menggunakan purposive sampling, beberapa sampel yang didapat terkandung dalam tabel 1.

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2020	193
2	Perusahaan manufaktur yang memiliki data informasi yang kurang lengkap	(143)
	Sampel penelitian	50
	Lama penelitian (tahun)	3
	Jumlah sampel penelitian	150

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standard Deviation
ICD	150	0,208	1,000	0,71109	0,214563
BSIZE	150	2,00	10,00	4,820	1,88982
OUT	150	0,143	0,800	0,39873	0,115423
BLOCK	150	0,00	0,977	0,68789	0,231059
GOV	150	0,00	0,81	0,0388	1,60089
BTENURE	150	0,50	20,50	6,20657	4,294238

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2022

Tabel 3
Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	t	Signifikansi	Hasil
Ukuran dewan memiliki dampak positif pada tingkat pengungkapan IC	0,056	0,000	H1 diterima
Independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC	0,398	0,002	H2 diterima

Kepemilikan <i>blockholder</i> memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC	-0,353	0,000	H3 ditolak
Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC	0,092	0,388	H4 ditolak
Masa jabatan dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan IC	-0,001	0,591	H5 ditolak

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2022

Interpretasi Hasil

Hipotesis 1

Dampak dari ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan IC dalam perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia telah dilakukan pengujian hipotesis pertama. Dan menghasilkan tingkat signifikansi atau p-value sebanyak 0,000 serta koefisien beta sebanyak 0,056 dengan demikian hipotesis pertama diterima. Dengan begitu, maka terdapat dampak positif antara ukuran dewan komisaris dalam pengungkapan IC. Pengujian pada hipotesis pertama digunakan dalam menguji dampak ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan IC yang terjadi di perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil yang telah dilakukan pada pengujian ini menandakan bahwa nilai probabilitas sebanyak 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sebagai akibatnya hipotesis pertama dinyatakan diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak positif antara ukuran dewan komisaris dalam pengungkapan IC.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dampak yang positif serta signifikan yang terjadi antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan IC. Dengan kata lain, semakin banyak anggota dewan komisari yang dimiliki pada perusahaan, maka semakin banyak pengungkapan IC yang akan dihasilkan pada perusahaan. Pada perspektif teori agensi, semakin besar jumlah dewan komisaris, semakin mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi. Menambahkan anggota pada dewan komisaris dapat menambah informasi serta sumber daya yang bermanfaat. Selain itu, peningkatan jumlah dewan secara langsung akan meningkatkan daya saing pada perusahaan serta dapat meningkatkan lingkungan perusahaan dalam keterbukaan informasi dalam pengungkapan yang lebih baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa lebih banyak dewan cenderung mengungkap masalah pemerintah untuk memberikan lebih banyak keahlian serta pengawasan administratif, dan akses untuk sumber daya yang lebih besar lagi.

Hipotesis 2

Pada Pengujian hipotesis kedua digunakan untuk menguji dampak positif antara persentase komisaris independen dan pengungkapan IC dalam perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil dari pengujian menjelaskan tingkat signifikansi p-value sebanyak 0,02 jika nilai lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien beta sebanyak 0,398 dengan demikian hipotesis kedua diterima. Maka dapat menyimpulkan antara persentase komisaris independen dan pengungkapan IC memiliki dampak positif.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menerangkan bahwa terdapat dampak positif serta signifikan yang terjadi pada persentase komisaris independen dan pengungkapan IC. Dengan kata lain, semakin banyak total anggota komisaris independen pada perusahaan, semakin banyak IC yang dapat diungkapkan. Lebih banyak perwakilan eksternal atau komisaris independen sering direkomendasikan karena cenderung lebih objektif dalam memantau perilaku administratif. Manajemen lebih objektif pada penerapan tindakan manajemen akan memfasilitasi pengungkapan informasi perusahaan yang lebih objektif dan lebih luas untuk mengurangi asimetri yang terjadi di

dalam perusahaan.

Hipotesis 3

Pada Uji hipotesis ketiga dilakukan menguji dampak positif yang terjadi dalam kepemilikan pemilik *blockholder* dan pengungkapan IC pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,000 jika nilainya lebih kecil dari 0,05 serta koefisien beta sebesar -0,353, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak negatif antara kepemilikan pemilik *blockholder* dengan pengungkapan IC.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif serta signifikan antara kepemilikan pemilik *blockholder* dengan pengungkapan IC. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase perusahaan yang dimiliki oleh *blockholder*, semakin rendah pengungkapan IC yang dihasilkan. Sedangkan perspektif teori keagenan, dikatakan bahwa manajemen dapat mengurangi biaya keagenan serta dapat memberikan tekanan pada manajer dalam bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Sumber daya dan keahlian adalah untuk mengatasi masalah keagenan yang muncul dari kepemilikan yang terdesentralisasi, karena pemilik *blockholder* saham yang besar dapat dikenakan biaya administrasi karena tingkat kepemilikan perusahaan. Dalam hal ini berarti memiliki peran yang lebih dalam memantau serta mendisiplinkan manajer. Oleh karena itu, apabila tidak memiliki kepentingan mayoritas, pemegang saham individu kurang ekonomis dalam mengeluarkan biaya pemantauan, karena hanya memperoleh sedikit manfaat. Oleh sebab itu, pemilik *blockholder* dapat melakukan peningkatan kualitas serta transparansi laporan pengungkapan IC.

Hipotesis 4

Pada pengujian hipotesis keempat menggunakan dampak positif antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan IC pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil pada penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi atau p-value sebesar 0,388. Dimana, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan koefisien beta adalah 0,098, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Dapat disimpulkan tidak terdapat dampak positif antara kepemilikan pemerintah pengungkapan IC.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menjelaskan tidak terdapat dampak positif dan signifikan yang terjadi pada kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan IC. Dengan kata lain, mayoritas persentase kepemilikan pemerintah, semakin tinggi pengungkapan IC yang akan dihasilkan. Dilihat pada perspektif teori keagenan, pemerintah cenderung menilai praktik serta pengungkapan tata kelola perusahaan yang tepat menjadi sarana untuk melindungi pemegang saham serta untuk mengurangi asimetri informasi. Manajemen melakukan pengungkapan IC untuk menginformasikan pada pihak berwenang dan masyarakat umum bahwa pemerintah telah melakukan penerapan kebijakan sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan sumber daya manusia. Karena tingginya tingkat kepemilikan pemerintah, maka tingkat pengungkapan IC akan lebih luas, terutama di bidang sumber daya manusia. Hal ini terjadi karena pengungkapan IC berfokus pada pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat.

Hipotesis 5

Pada pengujian hipotesis kelima digunakan dalam menguji dampak negatif antara masa jabatan dan pengungkapan IC pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi atau p-value sebesar 0,459. Dimana nilainya lebih besar dari 0,05, koefisien beta 0,002, dengan demikian hipotesis kelima ditolak. Dapat disimpulkan bahwa masa jabatan dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan IC.

Hasil pada pengujian statistik deskriptif menghasilkan nilai maksimum dan minimum dari variabel masa jabatan dewan komisaris adalah 0,5 dan 20,50. Di sisi lain, nilai mean dan standar deviasi adalah 6,2065 dan 4,29423. Maksimal masa jabatan dewan komisaris jauh dari rata-rata dan standar deviasi. Nilai ini menghasilkan nilai ekstrim dan mungkin merupakan tanda hubungan yang tidak signifikan antara variabel yang diuji.

Karena situasi yang dihadapi di Indonesia, beberapa perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih komprehensif setiap tahun. Kondisi ini menyatakan bahwa jika anggota dewan komisaris perusahaan berubah selama periode tersebut, perusahaan akan terus meningkatkan laporan tahunan yang diterbitkan, terlepas dari berapa lama anggota dewan komisaris perusahaan telah aktif di perusahaan.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan pemilik *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan terhadap tingkat pengungkapan IC. Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2020. Diimplementasikan oleh Guthrie et al. (2004) dan diterapkan kembali oleh Whiting & Miller (2008) dan Alfraih (2018) untuk menentukan ini berdasarkan kerangka kerja yang menentukan tingkat pengungkapan IC, dengan menggunakan analisis laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2020. Selanjutnya, menguji hubungan antara pengungkapan IC dengan kelima hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda.

Peneliti menemukan hasil bahwa ukuran dewan, independensi komisaris serta kepemilikan *blockholder* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap IC. Sementara itu, penelitian juga menemukan bahwa kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan komisaris tidak mempengaruhi IC.

Hasil yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,42 atau 42,2%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan IC dapat dipengaruhi variabel ukuran dewan, independensi komite, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan masa jabatan dewan komisaris. Tetapi 57,8% sisanya dijelaskan diluar variabel yang peneliti gunakan.

Keterbatasan

Peneliti menemukan beberapa keterbatasan selama melakukan penelitian, keterbatasan – keterbatasan tersebut berupa:

1. Dari aspek struktur kepemilikan dari tata kelola perusahaan, terdapat variabel kepemilikan *blockholder* yang memiliki pengertian tentang kepemilikan saham di atas 5% oleh individu, keluarga, institusional dan manajerial sehingga masih bersifat umum dan dapat dilakukan investigasi yang lebih dalam.
2. Tingkat pemahaman materi tentang penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan opini dalam penentuan tingkat pengungkapan modal intelektual. Perbedaan tersebut dikarenakan subjektivitas peneliti pada penelitian ini.

Saran

Untuk menangani keterbatasan diatas serta hal-hal lain yang berguna bagi penelitian selanjutnya, penulis memiliki sejumlah saran sebagai berikut:

1. Penelitian pada tahap selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel kepemilikan saham di atas 5% oleh individu, keluarga, institusional dan manajerial.
2. Pada hasil pengujian koefisiensi determinasi nilai yang terdapat pada Adjusted R2 sebesar 0,422 atau 42,2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan modal intelektual dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan, independensi komite, kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, dan durasi. Sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel selain yang ada dalam model penelitian, dengan demikian peneliti menyarankan agar menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya. Profesionalitas dari dewan komisaris, jenis kelamin, ikatan, serta kualifikasi akademik.

REFERENSI

- Abdul Rashid, A., Kamil Ibrahim, M., Othman, R., & Fong See, K. (2012). IC disclosures in IPO prospectuses: evidence from Malaysia. 13(1), 57-80. doi:10.1108/14691931211196213
- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4), 504–518. <https://doi.org/10.1108/14691931011085650>
- Abeysekera, I., & Guthrie, J. (2005). An empirical investigation of annual reporting trends of intellectual capital in Sri Lanka. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 151-163. doi:10.1016/s1045-2354(03)00059-5

- Ahmed Haji, A., & Mohd Ghazali, N. A. (2013). A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 21(1), 27-52. doi:10.1108/13217341311316931
- Albassam, W. (2014). Corporate Governance, Voluntary Disclosure and Financial Performance: An Empirical Analysis of Saudi Listed Firms Using A MixedMethods Research Design. (PhD), University of Glasgow. PhD thesis.
- Alcaniz, L., Gomez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2015). Firm characteristics and intellectual capital disclosure in IPO prospectuses. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 28(4), 461-483. doi:10.1108/arla-09-2014-0134
- Alfraih, M. M. (2018). The role of corporate governance in intellectual capital disclosure. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(1), 101-121. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2017-0026>
- Anam Ousama, A., Fatima, A. H., & Rashid Hafiz. Majdi, A. (2012). Determinants of intellectual capital reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 2(2), 119-139. doi:10.1108/20421161211229808
- Bebchuk, L. A., & Cohen, A. (2003). The Costs of Entrenched Boards. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.556987
- Berberich, G., & Niu, F. (2011). Director Busyness, Director Tenure and the Likelihood of Encountering Corporate Governance Problems. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1742483
- Bonazzi, L., & Islam, S. M. N. (2007). Agency theory and corporate governance: A study of the effectiveness of board in their monitoring of the CEO. 2(1), 723. doi:doi:10.1108/17465660710733022
- Bozzolan, S., O'Regan, P., & Ricceri, F. (2006). Intellectual capital disclosure (ICD). *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(2), 92-113. doi:10.1108/14013380610703111
- Branco, M. C., Kapardis, M. K., Delgado, C., Sá, M., & Sousa, C. (2010). An analysis of intellectual capital disclosure by Portuguese companies. *EuroMed Journal of Business*, 5(3), 258-278. doi:10.1108/14502191011080809
- Brüggen, A., Vergauwen, P., & Dao, M. (2009). Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia. *Management Decision*, 47(2), 233-245. doi:10.1108/00251740910938894
- Byrd, J., Cooperman, E. S., & Wolfe, G. A. (2010). Director tenure and the compensation of bank CEOs. *Managerial Finance*, 36(2), 86-102. doi:10.1108/03074351011014523
- Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: An analysis of European biotechnology companies. In *European Accounting Review* (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/09638180701707011>
- CFA. (2007). A Comprehensive Business Reporting Model: *Financial Reporting for Investors*. Standards and Position Papers.
- Cooke, T. E. (1989). Voluntary Corporate Disclosure by Swedish Companies. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 1(2), 171-195. doi:10.1111/j.1467-646X.1989.tb00009.x

- Dhillon, A., & Rossetto, S. (2009). Corporate control and multiple large shareholders. Working Paper. Coventry: University of Warwick, Department of Economics. Warwick economic research papers (No.891). Available at: <http://wrap.warwick.ac.uk/1326/>
- Donnelly, R., & Mulcahy, M. (2008). Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. *Corporate Governance: An International Review*, 16(5), 416–429. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00692.x>
- Dou, Y., Hope, O.-K., Thomas, W. B., & Zou, Y. (2016). Individual Large Shareholders, Earnings Management, and Capital-Market Consequences. *Journal of Business Finance & Accounting*, 43(7-8), 872-902. doi:10.1111/jbfa.12204
- Edmans, A. (2014). *Blockholders* and Corporate Governance. *Annual Review of Financial Economics*, 6(1), 23-50. doi:10.1146/annurev-financial-110613-034455
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1). doi:10.2307/258191
- Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331-356. doi:10.1111/corg.12095
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325–345. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(03\)00037-1](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(03)00037-1)
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325. doi:10.1086/467037
- FASB. (2001). Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures. *The Financial Standards Accounting Boards*.
- Fauzi, F. (2012). Equity Ownership and Capital Structure Determinants: A Study of New Zealand-Listed Firms. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.2047218
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Financial Fraud, Director Reputation, and Shareholder Wealth. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.687412
- Firer, S., & Williams, S. M. (2015). Firm ownership structure and intellectual capital disclosures. *South African Journal of Accounting Research*, 19(1), 1-18. doi:10.1080/10291954.2005.11435116
- Firth, M., Peter M. Y. Fung, dan Oliver M. Rui, 2008, Ownership, governance mechanisms, and agency cost in China's listed firms, *Journal of Asset Management*, vol. 9, no. 2, pp 90 - 101.
- Gamerschlag, R. (2013). Value relevance of human capital information. *Journal of Intellectual Capital*, 14(2), 325-345. doi:10.1108/14691931311323913
- Gan, K., Saleh, Z., Abessi, M., & Huang, C. C. (2013). Intellectual capital disclosure in the context of corporate governance. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 10(1). doi:10.1504/ijlic.2013.052077
- Guthrie, J., & Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. *Journal of Intellectual Capital*, 1(3), 241–251. <https://doi.org/10.1108/14691930010350800>
- Guthrie, J., Petty, R., Yongvanich, K., & Ricceri, F. (2004). Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting. *Journal of Intellectual Capital*, 5(2),

282-293. doi:10.1108/14691930410533704

- Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 21(1), 27–52. <https://doi.org/10.1108/13217341311316931>
- Handajani, L., Subroto, B., Sutrisno, T., & Saraswati, E. (2014). Does board diversity matter on corporate social disclosure? An Indonesian evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5, 8-16.
- He, J., Mahoney, J. T., & Wang, H. C. (2009). Firm capability, corporate governance and competitive behaviour: a multi-theoretic framework. *International Journal of Strategic Change Management*, 1(4). doi:10.1504/ijscm.2009.031408
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Hidalgo, R. L., García-Meca, E., & Martínez, I. (2011). Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0692-x>
- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604- 619. doi:10.1108/02686900710759406
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3). doi:10.1111/j.15406261.1993.tb04022.x
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Keenan, J., & Aggestam, M. (2001). Corporate governance and intellectual capital: Some conceptualisations. *Corporate Governance*, 9(4), 259–275. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00254>
- Kothari, S. P. (2005). Capital Markets Research in Accounting. *SSRN Electronic Journal*, 617. <https://doi.org/10.2139/ssrn.235798>
- Kruger, P. (2010). Corporate Social Responsibility and the Board of Directors. www.sfgeneva.org/doc/110317_kruegerCsrandBoard.pdf.
- Li, J. (1994). Ownership structure and board composition: A multi-country test of agency theory predictions. *Managerial and Decision Economics*, 15(4), 359-368. doi:10.1002/mde.4090150409
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137–159. <https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663326>
- Mak, Y. T., & Li, Y. (2001). Determinants of corporate ownership and board structure: evidence from Singapore. *Journal of Corporate Finance*, 7(3), 235-256. doi:10.1016/s0929-1199(01)00021-9
- Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures By U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 26(3), 555-572. doi:10.1057/palgrave.jibs.8490186

- Nelson, S. P., dan Nurul Farha Mohammed-Rusdi, 2015, Ownership structure influence on audit fee, *Journal of Accounting in Emerging Economies*, vol. 5, no. 4, pp 457 - 478.
- OECD. (2012). *Corporate Reporting of Intangible Assets: A Progress Report*.
- Oliveira, L., Lima Rodrigues, L., & Craig, R. (2006). Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(1), 11-33. doi:10.1108/14013380610672657
- Petty & Cuganesan. (2005). *Voluntary Disclosure of Intellectual Capital By Hong Kong Companies: Examining Size, Industri and Growth Effects Over Time*. doi:10.1111/j.1835-2561.2005.tb00291.x
- Purnomosidhi, B. (2006). Analisis Empiris Terhadap Ditirminan Pengungkapan Modal Intelektual Pada Perusahaan Publik BEJ.
- Puspita, T. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham Pada Saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009*. 1–64.
- Rodrigues, L. L., Tejedo-Romero, F., & Craig, R. (2016). Corporate governance and intellectual capital reporting in a period of financial crisis: Evidence from Portugal. *International Journal of Disclosure and Governance*, 14(1), 1-29. doi:10.1057/jdg.2015.20
- Rosenstein, S., & Wyatt, J. G. (1990). Outside directors, board independence, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*, 26(2), 175-191. doi:10.1016/0304-405x(90)90002-h
- Schuster, P., & O'Connel, V. (2006). The Trend Toward Voluntary Corporate Disclosures. *Management Accounting Quarterly*, 7(2), 1-9. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*, 94(3), 461–488.
- Sinaga, A. L., & Sudarno. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 7, Issue 4).
- Sundaramurthy, C., Mahoney, J. M., & Mahoney, J. T. (1997). Board Structure, Antitakeover Provisions, and Stockholder Wealth. *Strategic Management Journal*, 18(3), 231-245. doi:10.1002/(sici)1097-0266(199703)18:33.0.Co;2-v
- Sveiby, K. E. (1997). The Intangible Assets Monitor. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 2(1), 73-97. doi:10.1108/eb029036
- Vafeas, N. (2003). Length of Board Tenure and Outside Director Independence. *Journal of Business Finance Accounting*, 30(7-8), 1043-1064. doi:10.1111/1468-5957.05525
- Watson, A., Shrivies, P. and Marston, C. 2002. "Voluntary Disclosure of Accounting Ratios in The UK", *British Accounting Review*, Vol. 34 No. 4, pp. 289-313
- White, G., Lee, A., & Tower, G. (2007). Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies. *Journal of Intellectual Capital*, 8(3), 517-537. doi:10.1108/14691930710774894
- Whiting, R. H., & Miller, J. C. (2008). *Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the "hidden value"* <https://doi.org/10.1108/14013380810872725>
- Whiting, R. H., & Woodcock, J. (2011). Firm characteristics and intellectual capital disclosure by Australian companies. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 15(2), 102-126. doi:10.1108/14013381111157337



Widiyaningrum, A. (2004). Widiyaningrum 2014 - Intellectual Capital.Pdf. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 1, pp. 16–25)